### IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA MESIN BARU PENGGERAK EKONOMI

# Abdul Rachim AF<sup>1</sup>, Reslianty Rachim<sup>2</sup>, Muhammad Habibi<sup>3</sup>, Zulkifli<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, <sup>234</sup>Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda abdulrachim384@gmai.com, reslianty@uwgm.ac.id, habibi.mayangmaurai@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi makro, kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau lain dalam pembentukan growt national product (GNP), postur anggaran, perbandingan GNP dengan APBN, skema pendanaan IKN, hasil penelitian, data dan peluang atau potensi sosial ekonomi Kaltim dengan adanya IKN Nusantara. Metode penyuluhan live dialogue interaktif. Hasil kegiatan PKM ini masyarakat memahami dalam hal kesiapan Sosial Ekonomi Kerakyatan Kaltim Menuju IKN memerlukan SDM Kaltim yang diperlukan dengan 3 (tiga) mantra yakni intak (kurikulum sekolah), Iptek (vokasi dan kesesuaian potensi daerah), kearifan lokal (seni dan budaya).

Kata kunci: IKN Nusantara, Penggerak Sosial Ekonomi.

#### Pendahuluan

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota khususnya di Indonesia.

Strategi pengembangan ekonomi di IKN dan Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia dengan terciptanya kesempatan kerja baru di sektor infrastruktur yang dapat menyerap sampai dengan 500 ribu pekerja konstruksi potensial hingga 2024. Selain itu, pemerintah akan melakukan diversifikasi dan mengembangkan sektor ekonomi baru, serta menjalankan prinsip pengembangan industri yang berkelanjutan. Konsep pembangunan di IKN dilaksanakan melalui kerja sama Ekosistem Tiga Kota, yaitu IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Berkaitan dengan pembicaraan IKN Nusantara yang diminta oleh RRI Samarinda sebagai naras sumber utama secara umum membahas IKN Nusantara sebagai mesin baru penggerak ekonomi Republik Indonesia. Pembicaraan tersebut juga didukung oleh pemateri lain yakni Kepala DPMPTSP Kaltim, Pengamat Hubungan Internasional Kaltim, Kepala Otorita IKN Nusantara, Wakil Ketua DPRD Kaltim, dan Pimpinan Bank Indonesia wilayah Kaltim.

Secara khusus pelaksana PKM menjelaskan analisa ekonomi makro, kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau lain dalam pembentukan growt national product (GNP), postur

anggaran, perbandingan GNP dengan APBN, skema pendanaan IKN, hasil penelitian, data dan peluang atau potensi sosial ekonomi Kaltim dengan adanya IKN Nusantara.

#### Metode

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan:

Dilakukan oleh RRI melalui siaran *live dialogue* interaktif aspirasi Nusantara yang konsen membahas keberadaan IKN baru di Kaltim. Dilaksanakan pada hari Jum'at 26 Agustus 2022 pukul 20:30-22:00 wita di studio Si Karut RRI Samarinda jalan M. Yamin.

#### Alat dan Bahan Pelaksanaan PKM:

Beberapa alat digunakan dalam siaran diskusi RRI melalui siaran live dialogue interaktif, dengan peralatan audio sesuai standar RRI. Pelaksana PKM menyiapkan sejumlah bahan berbentuk ringkasan dan skema paparan diskusi.

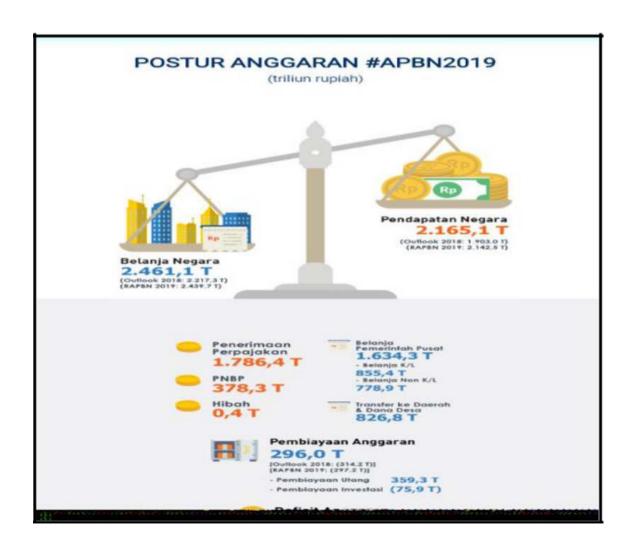
#### Metode Pelaksanaan PKM:

Tahapan kegiatan penyuluhan meliputi pembukaan dan perkenalan sesi oleh host RRI, pelaksana PKM sebagai naras umber utama menjelskan tentang enalisa ekonomi makro, kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau lain dalam pembentukan growt national product (GNP), postur anggaran, perbandingan GNP dengan APBN, skema pendanaan IKN, hasil penelitian, data dan peluang atau potensi social ekonomi Kaltim dengan adanya IKN Nusantara, serta dilanjutkan oleh pemateri lainnya, serta dialog interaktif secara langsung dengan masyarakat pendengar.

#### Hasil & Pembahasan



	#APBN2019 (tribuus rupiah)					
		RAPBN 2019	APBN 2019			
-	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3			
25	Inflasi (% yoy)	3,5	3,5			
(8)	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	15.000			
	Suku Bunga	5,3	5,3			
	Harga Minyak (US\$/barrel)	70	70			
PAI	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	750	775			
-	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.250	1.250			
(co)	Cost Recovery (milliar USD)	11,3	10,22			





# KONTRIBUSI VS PENERIMAAN

PULAU/PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB (%)	KONTRIBUSI PDRB (Miliar .Rp)	DBH (Miliar .Rp)	DAU (Miliar .Rp)	DAK	APBN (Triliun .Rp)
PULAU JAWA	58,49%	5.544.823	25.500	11.702	1.771	922,26
LUAR JAWA	41,51%	3.953.746	63.725	389.787	6.659	388,16
PULAU KALIMANTAN	7,87%	807.962	4.456	6,358	1.246	49,49
1. Prov. Kalimantan Timur	4,01	438.977	2,600	757	290	7,87
2. Prov. Kalimantan Selatan	1,16	115.727	754	1,118	191	8,79
3. Prov. Kalimantan Utara	0,53	51,165	342	1,185	144	6,33
4. Prov. Kalimantan Barat	1,28	118.184	227	1,724	400	9,90
5. Prov. Kalimantan Tengah	0,89	83.909	533	1,574	219	16,60
PULAU SULAWESI	6,04%	563.975	842	7.096	1.295	88,30

Sumber: BPS KONTRIBUSI PENERIMAAN

ALOKASI DANA APBN KALTIM TERENDAH KEDUA SETELAH KALIMANTAN UTARA
DARI LIMA PROVINSI SE KALIMANTAN











## Kesimpulan

Kesiapan Sosial Ekonomi Kerakyatan Kaltim Menuju IKN memerlukan SDM Kaltim yang diperlukan dengan 3 (tiga) mantra yakni intak (kurikulum sekolah), Iptek (vokasi dan kesesuaian potensi daerah), kearifan lokal (seni dan budaya). Ketiga mantra tersebut harus didukung oleh 3 (tiga) pemangku kepentingan yakni pihak pemerintah (pendidikan gratis berbayar, interkoneksitas, permodalan, peluang pasar, vokasional, kesesuaian dengan SDA), pihak publik (berjiwa wirausaha), dan pihak privat (dukungan pengusaha besar terdapat sosial ekonomi berbasis kerakyatan.

#### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Ibu Kota Negara*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 *Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara* 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara